

PERAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KASUS KAWASAN ASEAN-2

¹Indra Ismayudi Tanjung, ²Liasulistia Ningsih, ³Hartini, ⁴Aglis Andhita Hatmawan, ⁵Noval Suhendra

¹²³⁴⁵Universitas Teuku Umar

¹indratanjung@utu.ac.id

ABSTRACT

Financial inclusion refers to a condition where every member of society has access to various formal financial services. Easy access to financial products and services is expected to provide great opportunities for both companies and households to increase income and independence which has a positive impact on the development economy. Each country has different financial inclusion policies according to the economy and socio-cultural characteristics, but has the same goal, namely to develop the economy and reduce poverty. Given the importance of cooperation that has been carried out by ASEAN member countries in increasing financial inclusion through Digital Financial Services (DFS), this study will analyze the role of financial inclusion in economic development in the ASEAN region. Therefore, various variables are studied in this study, including the number of bank branches, the number of ATMs, and domestic credit which are indicators of financial inclusion and the economic development index as dependent variables. The analysis in this study uses quantitative analysis with the panel regression analysis method. The data used in this study uses the period from 2009-2020. The countries used in the analysis of this study come from 8 member countries that are members of ASEAN. The results of the analysis found that financial inclusion has an impact on economic development, this is reflected in the variables of the number of ATMs, the number of bank branches and domestic credit which have a significant impact on economic development.

Kata kunci : economic development, financial inclusion

ABSTRAK

Inklusi keuangan mengacu pada kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Akses terhadap produk dan layanan keuangan yang mudah diharapkan dapat memberikan peluang besar baik bagi perusahaan dan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian yang berdampak positif pada ekonomi pembangunan. Setiap negara memiliki kebijakan inklusi keuangan yang berbeda-beda sesuai dengan ekonomi dan ciri sosial budaya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Mengingat pentingnya kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui Digital Financial Services (DFS), maka penelitian ini akan menganalisis peran dari inklusi keuangan terhadap pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Oleh karena itu berbagai variabel diteliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu jumlah cabang bank, jumlah ATM, dan kredit domestik yang merupakan indikator dari inklusi keuangan dan indeks pembangunan ekonomi sebagai variabel dependen. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2009-2020. Negara yang digunakan dalam analisis penelitian ini berasal dari 8 negara anggota yang tergabung dalam ASEAN. Hasil analisis menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, hal ini dicerminkan dari variabel jumlah ATM, jumlah cabang bank dan domestik kredit yang berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Kata kunci : pembangunan ekonomi, inklusi keuangan

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan adalah tersedianya akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Secara sederhana, inklusi keuangan mengacu pada kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Kemiskinan dan kesenjangan dapat menurun melalui inklusi keuangan dengan membantu masyarakat melakukan investasi, memperlancar konsumsi, dan mengelola risiko keuangan (Demirguc-kunt, Klapper, & Singer, 2017). Akses ke layanan keuangan formal memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan dengan lebih efisien dan aman serta membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan dan bisnis. Penyedia layanan keuangan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan diatur dengan baik kepada konsumen. Pelajaran utama dari krisis keuangan global (GFC) 2007–2009 adalah pentingnya mengendalikan risiko keuangan sistemik dan menjaga stabilitas keuangan. Pada saat yang sama, negara-negara berkembang berupaya untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan perusahaan-perusahaan kecil, sebagai bagian dari strategi keseluruhan mereka untuk pembangunan ekonomi dan keuangan (Morgan & Pontines, 2014). Negara-negara berpendapatan rendah cenderung melihat sebagian besar penduduk dan perusahaan mereka tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal karena sejumlah alasan, termasuk: terbatasnya jaringan cabang bank dan lembaga keuangan lainnya; terbatasnya ketersediaan mesin ATM; biaya yang relatif tinggi untuk melayani simpanan dan pinjaman dalam jumlah kecil; keterbatasan identifikasi pribadi yang memadai; dan keterbatasan aset yang dapat dijaminkan dan informasi kredit. Akses kepada layanan keuangan sangat penting untuk mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan yang signifikan masih ada antara negara maju dan negara berkembang, dimana pada tahun 2017, 94 persen orang dewasa di negara maju memiliki rekening dibandingkan dengan 63 persen di negara berkembang (UNCTAD, 2021).

Peran inklusi keuangan menjadi sangat penting setelah pandemi Covid-19 akibat adanya pembatasan dalam berbagai hal sehingga memperburuk akses terhadap layanan keuangan. Hermawan, et al., (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan kuat terhadap penggunaan keuangan digital. Kemudahan dan efisiensi pembayaran serta transfer uang yang meningkat menjadi manfaat digitalisasi yang paling signifikan bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Kelompok yang paling rentan ini memerlukan respons kebijakan yang tepat sasaran, termasuk kebijakan inklusi keuangan untuk memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau dan berkelanjutan. Akses terhadap layanan keuangan merupakan hal yang penting bagi pembangunan dan disebutkan dalam beberapa tujuan dan target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Inklusi keuangan telah menjadi agenda kebijakan utama banyak negara, karena dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Tingkat perkembangan sektor keuangan, struktur pasar, dan kerangka regulasi juga memengaruhi inklusi keuangan. Layanan keuangan dicirikan oleh kegagalan pasar yang timbul dari asimetri informasi dan persaingan tidak sempurna. Jika tidak diatur secara memadai, asimetri informasi dapat mengakibatkan kurangnya pasokan kredit untuk kelompok populasi tertentu, atau bahaya moral yang menyebabkan kelebihan pasokan kredit dan meningkatnya utang. Persaingan tidak sempurna dapat menyebabkan konsentrasi pasar, meningkatkan biaya keuangan dan segmentasi pasar, dengan akibat kurangnya pasokan di daerah pedesaan dan masyarakat miskin. Sektor keuangan yang tidak terdiversifikasi dapat meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Adanya kegagalan pasar tersebut menunjukkan pentingnya regulasi yang baik dan perlunya kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan, akses universal, persaingan, dan perlindungan konsumen (UNCTAD, 2021). Negara-negara berpendapatan rendah

cenderung melihat sebagian besar penduduk dan perusahaan mereka tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal karena sejumlah alasan, termasuk: terbatasnya jaringan cabang bank dan lembaga keuangan lainnya; terbatasnya ketersediaan mesin ATM; biaya yang relatif tinggi untuk melayani simpanan dan pinjaman dalam jumlah kecil; keterbatasan identifikasi pribadi yang memadai; dan keterbatasan aset yang dapat diagunkan dan informasi kredit (Morgan & Pontines, 2014).

Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi digital inklusif dan partisipatif (Satya, 2023). Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan strategi kebijakan pemerintah dan kolaborasi multipihak yang membantu digitalisasi ASEAN untuk menavigasi dunia keuangan dengan lebih kompeten, menanamkan ketahanan terhadap tantangan ekonomi dan bermanfaat bagi ekonomi digital yang dinamis, inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN (World Economic Forum, 2022). Inklusi keuangan dan digitalisasi memiliki keterkaitan yang erat pada sistem pembayaran. Satya (2023) menyatakan bahwa kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan dapat dilakukan melalui (i) pengembangan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan; (ii) pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran; (iii) penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan (iv) penguatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Berdasarkan data bank dunia rata-rata indeks inklusi keuangan di ASEAN pada tahun 2021 mencapai 41%. Kecilnya indeks inklusi keuangan ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat di kawasan ASEAN yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan. Rendahnya indeks inklusi keuangan ini dapat berdampak pada ekonomi di kawasan ASEAN. Pentingnya peran inklusi keuangan bagi perekonomian di negara-negara kawasan ASEAN menjadi latarbelakang dibentuknya Working Committee on Financial Inclusion (WF-FINC) yang bertujuan untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, negara-negara di ASEAN menunjukkan tingkat kemajuan yang berbeda dalam kebijakan dan peraturan Digital Financial Services (DFS) (World Bank, 2022a). Layanan keuangan digital (DFS) dapat berpotensi mengurangi hambatan terhadap inklusi keuangan. Di seluruh ASEAN, beberapa faktor telah membantu pengembangan DFS, termasuk (a) kerangka kerja yang mendukung penyediaan pembayaran, (b) penggunaan uang elektronik secara luas, dan (c) peraturan yang memungkinkan penggunaan agen oleh bank dan entitas nonbank. Perluasan DFS di ASEAN akan menguntungkan inklusi keuangan; namun, perluasan ini akan memerlukan dukungan dari otoritas untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan DFS secara komprehensif dan terkoordinasi. Sebagian besar negara ASEAN memiliki rekening di lembaga keuangan formal kurang dari 50 persen. Penetrasi pembayaran digital di sebagian besar negara ASEAN berada di bawah 40 persen, dan kesenjangan dalam adopsi DFS lebih tinggi. Mendukung kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang sudah ada di negara-negara (ASEAN) akan membantu mempromosikan layanan keuangan digital (DFS) dalam konteks inklusi keuangan. Tiga landasan utama untuk mendorong DFS untuk inklusi keuangan meliputi (a) komitmen sektor publik dan swasta pada inklusi keuangan digital, (b) kerangka hukum dan peraturan untuk DFS, dan (c) infrastruktur keuangan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang relevan dengan inklusi keuangan digital (World Bank, 2022a).

Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di berbagai negara (Van & Linh, 2019). Akses terhadap produk dan layanan keuangan yang mudah diharapkan dapat memberikan peluang besar baik bagi perusahaan dan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian yang berdampak positif pada ekonomi pembangunan. Inklusi keuangan sangat penting dalam mengurangi kesenjangan antara masyarakat menengah keatas dan menengah ke bawah. Setiap negara memiliki kebijakan inklusi keuangan yang berbeda-

beda sesuai dengan ekonomi dan ciri sosial budaya mereka, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Mengingat pentingnya kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui DFS, maka penelitian ini akan menganalisis peran dari inklusi keuangan terhadap pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN.

LANDASAN TEORI

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan yaitu dimana orang dewasa memiliki akses dan dapat secara efektif menggunakan berbagai layanan keuangan yang sesuai (Demircuc-kunt, Klapper, & Singer, 2017). Layanan tersebut disediakan kepada konsumen dan dipertanggung jawabkan dengan aman oleh penyedia layanan dalam lingkungan yang diatur dengan baik. Pada tingkat yang paling mendasar, inklusi keuangan dimulai dengan memiliki rekening simpanan atau transaksi di bank atau lembaga keuangan lainnya atau melalui penyedia layanan uang seluler, yang dapat digunakan untuk melakukan dan menerima pembayaran serta menyimpan atau menabung uang. Inklusi keuangan mengacu pada akses perusahaan dan rumah tangga terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan rumah tangga (Beck, 2015). Akses terhadap layanan keuangan dapat didefinisikan dalam beberapa dimensi, termasuk akses geografis (yaitu, kedekatan dengan penyedia layanan keuangan) dan akses sosial ekonomi (yaitu, tidak adanya biaya yang mahal dan persyaratan dokumentasi).

Inklusi keuangan merupakan pendorong penting bagi pertumbuhan inklusif karena membantu masyarakat untuk berinvestasi di masa depan, mengelola guncangan keuangan, dan memperlancar konsumsi rumah tangga, yang semuanya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan (Arandara & Gunasekera, 2020). Memiliki sistem keuangan yang beragam dan kompetitif dengan berbagai jenis lembaga keuangan dapat membantu memajukan inklusi keuangan (World Bank, 2022b). Beck (2015) menyatakan bahwa ada beberapa hambatan yang dapat memperlambat dalam mencapai inklusi keuangan, yang pertama adalah dari sisi permintaan, dimana kurangnya literasi keuangan telah diidentifikasi sebagai hambatan yang signifikan. Kendala perilaku dan internal rumah tangga penting terutama untuk keputusan menabung, tetapi juga untuk keputusan seputar alokasi sumber daya kredit. Selain itu, bagi beberapa kelompok populasi, kendala agama mengenai kontrak berbunga membatasi keinginan mereka untuk mengakses keuangan konvensional formal. Selanjutnya dari sisi penawaran yaitu dilihat dari biaya dan risiko yang tinggi merupakan inti dari terbatasnya pasokan layanan keuangan ke pasar kelas bawah. Biaya tetap penyediaan layanan keuangan (yaitu biaya yang tidak bergantung pada jumlah simpanan atau kredit, jumlah transaksi klien, atau jumlah klien yang dilayani di cabang atau oleh lembaga) membuat penyediaan layanan kepada segmen populasi berpendapatan rendah menjadi lebih sulit, karena mereka adalah nasabah dengan permintaan transaksi yang lebih kecil dan/atau lebih sedikit. Populasi yang tersebar di daerah pedesaan juga membuat penyediaan layanan keuangan tradisional melalui kantor cabang fisik kurang layak secara komersial di luar pusat kota

Para pembuat kebijakan menerapkan berbagai strategi untuk mendorong inklusi. Strategi inklusi keuangan nasional adalah yang paling umum digunakan. Enam puluh tiga yurisdiksi telah menerapkan atau sedang mengembangkan strategi tersebut (World Bank, 2022b). Seiring dengan percepatan fintech, strategi keuangan digital dan fintech juga semakin populer; 56 yurisdiksi telah menerapkan atau sedang mengembangkannya. Tidak semua strategi atau kebijakan memiliki perspektif gender, rencana aksi, atau kerangka kerja pemantauan dan evaluasi; ketiadaan hal-hal ini membuat instrumen secara keseluruhan menjadi kurang efektif. Meningkatnya kesadaran akan manfaat inklusi keuangan bagi pembangunan nasional telah menyebabkan inklusi menjadi tujuan kebijakan yang semakin umum dan penting. Para pembuat kebijakan telah menerapkan berbagai strategi dan instrumen lain untuk mencapai tujuan inklusi mereka. Otoritas nasional juga menggunakan

serangkaian kebijakan dan program untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kebijakan umum meliputi insentif fiskal, bujukan untuk memperluas titik akses, menetapkan bahwa pemerintah melakukan pembayaran secara digital, dan mewajibkan FSP untuk menyediakan jenis akun dasar tertentu. Para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan teknologi geospasial untuk meningkatkan akses ke financial access points (FAP) dan inklusi keuangan dalam beberapa cara: (i) meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis bukti, (ii) memfasilitasi pengawasan sektor keuangan, (iii) memantau dan mengevaluasi kemajuan inklusi keuangan, dan (iv) menciptakan barang publik untuk mendukung sektor keuangan.

Pembangunan Ekonomi

Van & Linh (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan definisi antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi memiliki kelemahan dalam hal tidak dapat mencerminkan dampak eksternal seperti pencemaran lingkungan, yang dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan dan produktivitas karyawan serta kualitas produk. Pertumbuhan ekonomi hanya merujuk pada kuantitas daripada kualitas barang dan jasa yang diproduksi dan penetrasi produk baru yang menggantikan produk lama. Adelman (2000) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi menggabungkan: (1) pertumbuhan yang berkelanjutan; (2) perubahan struktural dalam pola produksi; (3) peningkatan teknologi; (4) modernisasi sosial, politik dan kelembagaan; dan (5) peningkatan menyeluruh dalam kondisi manusia. Abu (2024) menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berhubungan positif dengan inklusi keuangan yang lebih besar. Lebih banyak orang dengan sumber daya keuangan yang tersedia dapat berinvestasi dalam kewirausahaan, pendidikan, dan sumber pendapatan lainnya, yang akan meningkatkan produktivitas dan memajukan ekonomi negara secara keseluruhan. Saat ini, inklusi keuangan secara umum dipandang sebagai hak semua warga negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat, standar hidup yang lebih tinggi, dan sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin di negara tersebut untuk mencapai kemajuan ekonomi. Aksesibilitas layanan keuangan yang lebih besar mendorong kewirausahaan dan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja. Orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan yang tersedia berada dalam posisi yang lebih baik untuk meluncurkan perusahaan, yang menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Inklusi keuangan secara tradisional dipahami sebagai penyediaan berbagai layanan keuangan yang mudah dan terjangkau untuk digunakan. Salah satu penggerak utama pertumbuhan adalah ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan. Hasil penelitian dari Sarma & Pais (2011) menemukan bahwa tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan di suatu negara saling berkaitan erat. Sarma & Pais (2011) membandingkan faktor-faktor sosial seperti pendapatan, literasi dan urbanisasi untuk membuktikan bahwa pembangunan sektor keuangan dan perbankan berhubungan langsung dengan inklusi keuangan. Cicchiello et al., (2021) menjelaskan bahwa sistem keuangan yang dikembangkan dengan baik dan tepat sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat berfungsi sebagai sarana menarik investasi yang diperlukan untuk mendorong pembangunan suatu negara. Pembangunan, pada gilirannya, dapat memperluas cakupan layanan keuangan dan sistem keuangan. Para pembuat kebijakan dapat memfasilitasi layanan keuangan dengan membuat perubahan pada undang-undang yang ada.

Hubungan antara inklusi keuangan dengan pembangunan ekonomi

Sarma & Pais (2011) meneliti hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan dengan mengidentifikasi secara empiris faktor-faktor spesifik negara yang terkait dengan tingkat inklusi keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan di suatu negara saling berkaitan erat. Di antara faktor-faktor yang terkait dengan sosial-ekonomi dan infrastruktur, pendapatan, kesenjangan, literasi,

urbanisasi, dan infrastruktur fisik untuk konektivitas dan informasi adalah faktor-faktor yang penting. Cicchiello, *et al.*, (2021) melakukan penelitian hubungan antara inklusi keuangan dan variabel pembangunan di negara-negara paling tidak berkembang di Asia dan Afrika dengan menggunakan analisis data panel untuk mengeksplorasi analisis, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat meningkat pesat seiring dengan peningkatan PDB, begitu juga sebaliknya, pertumbuhan PDB dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan.

Inklusi keuangan, yang dapat memberikan akses dan penggunaan berbagai macam produk dan layanan keuangan berkualitas, menurut Cabeza-García *et al.*, (2019) dapat memberikan dampak positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Cabeza-García *et al.*, (2019) secara khusus, menganalisis pengaruh dari kontribusi perempuan dalam sistem keuangan yang menggunakan sampel 91 negara, yang terdiri dari negara maju dan berkembang, dimana hasil analisis membuktikan fakta bahwa inklusi keuangan perempuan yang lebih besar, memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi. Ifediora *et al.*, (2022) menyatakan bahwa inklusivitas keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian karena memfasilitasi penciptaan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Ifediora *et al.*, (2022) menemukan bahwa dimensi ketersediaan inklusi keuangan dan dimensi penetrasi inklusi keuangan berdampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adedokun & Aga (2021) menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika Sub-Sahara (SSA) untuk periode 2004–2017 dan menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SSA. Temuan lainnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi dengan inklusi keuangan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus menekankan strategi yang mendorong akses ke layanan dan produk keuangan yang berkualitas dan terjangkau, untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data panel dari 8 negara anggota ASEAN selama periode 2009-2020. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari World Bank. Berdasarkan ketersediaan data analisis, maka penelitian ini hanya menggunakan 8 negara anggota dari 10 negara anggota ASEAN, diantaranya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator pembangunan ekonomi (Human Development Index) (Van & Linh, 2019). Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu jumlah cabang bank (*The number of bank branches per 100,000 adults*), jumlah ATM (*The number of ATMs per 100,000 adults*), dan kredit domestik (*Domestic credit to the private sector*) merupakan indikator dari inklusi keuangan. Adapun beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi (*GDP growth*), inflasi, kepadatan penduduk (*population density*), pembentukan modal tetap bruto (*Gross fixed capital formation*). Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari World Bank dari tahun 2009-2020.

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari Van, DTT & Linh, NH (2019) yang menggunakan indikator pembangunan ekonomi sebagai variabel dependen dan jumlah cabang bank (*The number of bank branches per 100,000 adults*), jumlah ATM (*The number of ATMs per 100,000 adults*), dan kredit domestik sebagai variabel independen, maka model ekonometrik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap pembangunan ekonomi yaitu:

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 ATM_{it} + \beta_2 BANK_{it} + \beta_3 GDPGRWTH_{it} + \beta_4 GFC_{it} + \beta_5 INF_{it} + \beta_6 POP_{it} + \beta_7 DCTPS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana: β_0 adalah konstanta, ATM_{it} adalah jumlah ATM, $BANK_{it}$ adalah jumlah cabang bank, $GDPGRWTH_{it}$ adalah pertumbuhan ekonomi, GFC_{it} adalah pembentukan modal tetap bruto, INF_{it} adalah inflasi, POP_{it} adalah kepadatan penduduk, dan $DCTPS_{it}$ adalah kredit domestik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa pengujian yang harus dilakukan sebelum mendapatkan model terbaik adalah dengan menguji apakah model terbaik yang digunakan adalah PLS, FEM atau REM. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan pada Tabel 1 bahwa berdasarkan uji chow nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa hasil terbaik adalah model FEM dan berdasarkan uji hausman nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa hasil terbaik adalah model FEM.

Tabel 1. Pemilihan model terbaik

Pengujian	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Model terbaik
Chow	347.325495	7	0.0000	FEM
Hausman	2937.221590	7	0.0000	FEM

Berdasarkan hasil estimasi dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Tabel 2. Hasil estimasi

Variabel	Signifikan
ATM	0.0012***
BANK	-0.0016***
GDPGRWTH	0.0002
GFC	5.38E-05
INF	-0.0009***
POP	1.08E-05**
DCTPS	0.0004***
C	0.6584***
Adj R2	0.99
Probabilitas (F-statistic)	0.0000

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa ATM dan DCTPS berpengaruh signifikan positif terhadap pembangunan ekonomi (Van & Linh, 2019), sedangkan jumlah bank berpengaruh signifikan negatif terhadap pembangunan ekonomi. Van & Linh, 2019 menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah cabang bank dan ATM berkorelasi dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap sumber keuangan formal; dengan demikian, komunikasi tentang layanan keuangan akan semakin meningkat. Namun, hal yang sebaliknya belum tentu benar, dimana penurunan jumlah cabang bank dan ATM mungkin bergantung pada kebijakan lembaga keuangan karena mereka ingin mengurangi jumlahnya untuk berkonsentrasi pada layanan daring seperti e-mobile, internet banking, dan sebagainya. Hal ini menjawab dari hasil estimasi bahwa pengaruh dari jumlah cabang bank berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi, yang artinya semakin tinggi jumlah cabang bank maka pembangunan ekonomi akan menurun sebesar 0.0016%. Meskipun memiliki pengaruh yang kecil namun hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah cabang bank tidak terlalu efektif mengingat saat ini masyarakat sudah mengenal kemajuan teknologi, yaitu dapat mengakses layanan keuangan dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kantor layanan perbankan. Abu (2024) menyatakan bahwa inklusi keuangan telah menjadi fokus kebijakan pembangunan dunia yang penting, terutama di pasar negara berkembang seperti Nigeria. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Abu (2024) menemukan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara kredit kepada sektor swasta dengan pembangunan ekonomi, serta ditemukan pula hubungan yang signifikan antara transaksi ATM dengan pembangunan ekonomi. Pendanaan investasi, kewirausahaan, dan ekspansi perusahaan—yang merupakan mesin penting pembangunan ekonomi—memerlukan kredit kepada sektor swasta. Selain itu pentingnya transaksi ATM bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai cerminan pola yang lebih besar dalam perilaku konsumen dan infrastruktur keuangan.

Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan diantaranya yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Kasidi & Mwanemela (2013), Adaramola & Dada (2020) yang menemukan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu tanggung jawab utama yang diberikan kepada lembaga moneter adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa dalam negeri. Penekanan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kebijakan moneter mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat nilai uang dan mencegah inflasi dan ketidakpastian terkaitnya, sehingga meningkatkan prospek pertumbuhan negara di masa mendatang. Karki et al., (2020) menyatakan bahwa inflasi merugikan perekonomian setelah melewati tingkat ambang batas tertentu. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan untuk mengatasi kemiskinan sekaligus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perlu ditetapkan untuk menjaga kisaran sasaran inflasi di sekitar tingkat inflasi optimal guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memastikan dampak negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi diminimalkan.

Kepadatan penduduk berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Ali et al., (2013) dan Tartiyus et al., (2015) bahwa pertumbuhan populasi telah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Khursanaliev (2023) menjelaskan bahwa populasi yang lebih besar dapat berarti bahwa suatu negara dapat memproduksi dan mengonsumsi lebih banyak barang dan jasa, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Namun, ini hanya dapat terjadi ketika kesempatan kerja tersedia dan orang-orang memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan. Populasi yang lebih besar dapat membantu produksi modal manusia generasi berikutnya mengatasi potensi berkurangnya hasil bagi modal manusia generasi ini, karena pertumbuhan populasi yang lebih besar mengarah pada spesialisasi yang lebih besar dan pasar yang lebih besar yang meningkatkan hasil bagi modal manusia dan pengetahuan.

PENUTUP

Inklusi keuangan sangat penting dalam mempersempit kesenjangan antara masyarakat berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Setiap negara akan memiliki kebijakan inklusi keuangan yang berbeda-beda yang paling sesuai dengan ekonomi dan ciri sosial budaya mereka, dengan tujuan yang sama untuk mengembangkan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah harus memastikan bahwa kondisi sistem keuangan di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang tepat untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif dan efisien, memperoleh modal yang mereka butuhkan untuk membiayai bisnis mereka, dan menggunakan leverage keuangan untuk memanfaatkan peluang yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan terus mendukung dan memperluas inisiatif-inisiatif keuangan mikro yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang kurang terlayani, khususnya di masyarakat pedesaan dan terpinggirkan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, N. I. (2024). FINANCIAL INCLUSION AND ECONOMIC DEVELOPMENT. *African Banking and Finance Review Journal*, 13(13), 43-62.
- Adaramola, A. O., & Dada, O. (2020). Impact of inflation on economic growth: evidence from Nigeria. *Investment Management & Financial Innovations*, 17(2), 1.
- Adedokun, M. W., & Ağa, M. (2023). Financial inclusion: A pathway to economic growth in Sub-Saharan African economies. *International Journal of Finance & Economics*, 28(3), 2712-2728.
- Adelam, I., (2000). Fifty Years of Economic Development: What Have We Learn?. *Working Paper*. World Bank
- Ali, S., Ali, A., & Amin, A. (2013). The impact of population growth on economic development in Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 18(4), 483-491.
- Arandara, R., & Gunasekera, A., (2020). Financial Inclusion and Inclusive Growth: What Does It Mean for Sri Lanka?. *Policy Research Working Paper*. World Bank
- Beck, T. 2015. "Microfinance: A Critical Literature Survey." Independent Evaluation Group, World Bank Group, Washington, DC
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2019, November). Female financial inclusion and its impacts on inclusive economic development. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 77, p. 102300). Pergamon.
- Cicchello, A. F., Kazemikhasragh, A., Monferrá, S., & Girón, A. (2021). Financial inclusion and development in the least developed countries in Asia and Africa. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10, 1-13.
- Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D., (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth. *Policy Research Working Paper*. World Bank
- Hermawan, A., Gunardi, A., & Sar, L.M., (2022). Intention to Use Digital Finance MSMEs: The Impact of Financial Literacy and Financial Inclusion. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*. 17 (1)
- Ifediora, C., Offor, K. O., Eze, E. F., Takon, S. M., Ageme, A. E., Ibe, G. I., & Onwumere, J. U. (2022). Financial inclusion and its impact on economic growth: Empirical evidence from sub-Saharan Africa. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2060551.
- Karki, S., Banjara, S., & Dumre, A. (2020). A review on impact of inflation on economic growth in Nepal. *Archives of Agriculture and Environmental Science*, 5(4), 576-582.
- Kasidi, F., & Mwakanemela, K. (2013). Impact of Inflation on Economic Growth: A Case Study of Tanzania. *Asian Journal of Empirical Research*, 3(4), 363-380.
- Khursanaliev, B. (2023). The impact of population growth on the country's economic development. *Qo 'qon universiteti xabarnomasi*, 1, 8-11.

- Morgan, P.J., & Pontines, P., (2014). Financial Stability and Financial Inclusion. *ADB Working Paper Series*
- Otoritas Jasa Keuangan., (2021). *2021 – 2025 National Strategy on Indonesian Financial Literacy*.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of international development*, 23(5), 613-628.
- Tartiyus, E.H., Dauda, M.I., & Peter, A. (2015). Impact of Population Growth on Economic Growth in Nigeria (1980-2010). *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 20(4), 115-123.
- UNCTAD (2021). *Financial Inclusion for Development: Better Access to Financial Services for Women, the Poor and Migrant Workers*
- Van, D.T.T., & Linh, N.H., (2019). The Impacts of Financial Inclusion on Economic Development: Cases in Asian-Pacific Countries. *Comparative Economic Research Central and Eastern Europe*. 22 (01)
- World Bank (2022a). *Advancing Digital Financial Inclusion in ASEAN: Policy and Regulatory Enablers*
- World Bank (2022b). *The Global State of Financial Inclusion & Consumer Protection*
- World Economic Forum (2022). *ASEAN Digital Generation Report: Digital Financial Inclusion*

OIKOS
Journal Kajian Pendidikan Ekonomi
dan Ilmu Ekonomi